

***FINANCIAL PERFORMANCE BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020-2022***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Nur Apriyanisa
NIM : E20193001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**FINANCIAL PERFORMANCE BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh:

**Nur Apriyanisa
NIM : E20193001**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.
NIP. 198803012018012001

**FINANCIAL PERFORMANCE BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syari'ah


Hari : Rabu

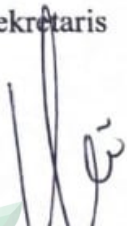
Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.
NIP. 198907232019032012


H. Ahmad Muzayyin, S.E.I., M.E.
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.


Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 1968122619966031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Marwah, 2010), 58.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada Bapak Kamaruddin dan Hasni Haryati (Almh) selaku orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan cinta kasihnya kepada saya serta do'a yang tak pernah putus dan rela bekerja keras demi kesuksesan anaknya. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan dan kesabarannya, yang tidak mungkin dapat dibalas oleh Penulis.
2. Keluarga besar tercinta dan kedua adek kandung Penulis yang selalu memberi dukungan dan motivasi agar tidak mudah menyerah dalam segala hal.
3. Kepada para "MANIS" (Ama, Ka tiara, Ka Icha, Ka Ais, Nanis, Ka Nita) dan sahabat-sahabat SMA yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk kesehatan mental Penulis.
4. Kepada sahabat dari Bima (Pira, Rika, Mina, Yuyu, Idan, Anis, Ana, Uyun) yang selalu mengajak healing di setiap ada kesempatan bertemu.
5. Kepada sahabat semasa kuliah Penulis (Mbak Kiki, Mbak Lilis, Opa, Nadiah) terimakasih karena selalu menemani dan menghibur selama masa kuliah ini.
6. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen, terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga ilmu yang diberi dapat bermanfaat dan barokah.
7. Untuk teman-teman semua yang sudah mengenal Penulis, kalian sudah menjadi teman yang baik untuk Penulis, dan khususnya kepada teman seperjuangan AKS 1 angkatan 2019, kalian luar biasa solid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi dengan judul “*Financial Performance* Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022” dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Syariah studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis merasa tidak berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, tentunya hal tersebut berupa bantuan, bimbingan, dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberi saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga Penulis bisa memperoleh kelancaran dalam menyusun skripsi.

5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
7. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan juga kepada seluruh karyawan dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yang telah bersedia memberikan bantuan informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh Penulis.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Jember, 20 Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Nur Apriyanisa, Nur Ika Mauliyah, 2023: *Financial Performance Berbasis Konsep Value For Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022*

Kata Kunci: Financial Performance dan Value For Money

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan daerah, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indeks pengukuran yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan pengukuran menggunakan pendekatan *value for money* (VFM). Implementasi analisis rasio pada organisasi sektor publik khususnya terhadap APBD masih sangat jarang digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara resmi mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu diterapkan meski kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, sehingga penggunaan *value for money* sebagai alat ukur kinerja pemerintah dianggap sudah tepat.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode tahun 2020-2022 berdasarkan konsep *Value For Money*?, 2. Bagaimana dampak penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima?.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode tahun 2020-2022 berdasarkan konsep *Value For Money*., 2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Serta analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan uji *dependability*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima berdasarkan konsep *value for money* dari sisi ekonomis pada tahun 2020-2022 dikatakan ekonomis, dari sisi efisiensi pada tahun 2020 dikatakan tidak efisien dan pada tahun 2021-2022 dikatakan efisien. dari sisi efektivitas pada tahun 2020-2022 dikatakan efektif. 2. Penerapan konsep *value for money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memberikan dampak pada kinerja keuangan dari sisi ekonomis berupa penggunaan anggaran yang dapat dilihat titik hematnya dalam penentuan harga suatu kegiatan, dari sisi efisiensi ini juga dapat membuat alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan dan tepat pada sasaran, dari sisi efektivitas dapat melihat kebutuhan masyarakat agar penggunaan dananya tidak sia-sia dan memiliki dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	73

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran-Lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Subjek Penelitian.....	40
Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020.....	56
Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021.....	57
Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022.....	57
Tabel 4. 4 Perbandingan Pengukuran Ekonomis Tahun 2020, 2021, dan 2022. ..	59
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020.....	60
Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021.....	60
Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022.....	61
Tabel 4. 8 Perbandingan Pengukuran Efisiensi Tahun 2020, 2021, dan 2022.....	62
Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Efektivitas Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020.....	63
Tabel 4. 10 Hasil Pengukuran Efektivitas Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022.....	64
Tabel 4. 12 Perbandingan Pengukuran Efektivitas Tahun 2020, 2021, dan 2022.	66
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Hasil Wawancara Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.....	70
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Value For Money Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022	75

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Selama ini pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tentang tingkat keberhasilan organisasi. Adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Diantaranya banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Kenyataan ini menyadarkan semua perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Sektor publik atau pelayanan publik yang ada di masyarakat dinilai sebagai sarang inefisiensi, penurunan anggaran secara signifikan dari Pagu anggaran Pemerintah serta diikuti oleh penurunan realisasi anggaran yang dilaksanakan

pada sektor publik sering terjadi sehingga dianggap sebagai instansi yang selalu mengalami kerugian.²

Dalam menjalankan aktivitas kegiatan atau pelaksanaan programnya, sektor publik atau pelayanan publik lebih memperhatikan kinerjanya. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya berumut.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.

Pentingnya kinerja dalam pelayanan publik sebagai tolak ukur dari tingkat keberhasilan dari pelayanan publik itu sendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Jika tidak diperhatikan kinerja yang ada di dalam pelayanan publik maka tidak akan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dari organisasi sektor publik. Dimana dalam menentukan tingkat keberhasilan

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 5.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Marwah, 2010), 10.

sektor publik tidak hanya melihat capaian pelaksanaan tetapi juga penilaian masyarakat yang dirasakan langsung terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan publik.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya sistem manajemen kinerja sektor publik (pemerintah) yang baik dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang akhirnya akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan instansi dalam mensukseskan serta mewujudkan pembangunan nasional didukung oleh sebagian aspek, yaitu pada sistem pelaporan keuangan instansi dan kinerja instansi pemerintah. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggung jawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional-nya (APBN), baik dari sisi kinerja maupun dari sisi keuangan.

Hasil pengukuran kinerja-kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut

merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik.⁴ Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah dilaksanakan untuk memenuhi tiga unsur. Pertama, membantu dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam berfokus pada tujuan dan target yang sesuai terhadap program unit kerja. Sehingga, bisa meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja akan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya serta membantu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi antar kelembagaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, maupun akuntabel dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama: 1) ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. 2) efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. 3) efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil

⁴Mahmudi, *Menejemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPT SYIM YKPN, 2015), 7.

program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik, yang dimaksud untuk memastikan agar pelayanan yang ditujukan sesuai dengan tujuannya, memperoleh peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, dapat mengurangi biaya akan pelayanan publik, sehingga dapat mengurangi pemborosan serta memperoleh penghematan saat pemakaian input, mengalokasikan belanja dengan memprioritaskan pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran uang publik (kesadaran biaya publik) sebagai dasar penerapan akuntabilitas publik.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bima untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan kekhasan dan kondisi alam yang ada, Kabupaten Bima memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan potensi sumber daya dalam hal kelautan dan perikanan, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima selaku organisasi sektor publik yang menangani masalah terkait kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima telah menetapkan program-program untuk mendukung perkembangan di sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memiliki program yang belum memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2020 sampai dengan 2022. Misalnya seperti salah satu artikel dari suarantb.com yang menyebutkan bahwa

⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 5.

budidaya rumput laut di Kabupaten Bima belum di optimalkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya penjelasan mengenai pembudidayaan rumput laut pada masyarakat di wilayah-wilayah pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tidak ada pengukuran kinerja secara resmi, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima melakukan pengukuran kinerja berdasarkan kemampuan satu tahunan, dari perencanaan keuangannya, realisasi kegiatan dan anggaran, dan laporan keuangan. Jadi, yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima berupa evaluasi tahunan dan belum menerapkan pengukuran kinerja secara resmi.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan daerah, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indeks pengukuran yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan pengukuran menggunakan pendekatan *value for money* (VFM). Implementasi analisis rasio pada organisasi sektor publik khususnya terhadap APBD masih sangat jarang digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara resmi mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu diterapkan meski kaidah pengakuntansian dalam

⁶ Observasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 20 Oktober 2023.

APBD berbeda dengan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, sehingga penggunaan *value for money* sebagai alat ukur kinerja pemerintah dianggap sudah tepat.⁷ Diharapkan instansi pemerintah khususnya dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima ini, agar selalu memperhatikan pendekatan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan di bidang kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Bima, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menggunakan metode *value for money*. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "*Financial Performance* Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima Periode Tahun 2020-2022"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode tahun 2020-2022 berdasarkan konsep *Value For Money*?
2. Bagaimana dampak penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima?

⁷Tsabita Ananda Mardhiah, "Analisis Kinerja Melalui Pendekatan Value For Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Periode 2018-2020"(Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022), 6.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode tahun 2020-2022 berdasarkan konsep *Value For Money*.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang *Financial Performance* berbasis konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan serta memberikan pengembangan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang *Financial Performance* berbasis konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dibidang sektor publik, serta menambah kepustakaan UIN KH Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bagi Instansi/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis kinerja keuangan dengan konsep *value for money* serta berguna sebagai bahan informasi bagi bagian keuangan khususnya dalam mengevaluasi kinerja keuangan dengan konsep *value for money*.

E. Definisi Istilah

1. Financial Performance

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan instansi dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang baik dan benar. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.⁸

2. Value For Money

Value For Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* ini memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for money* adalah sebuah konsep dalam pengukuran kinerja sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.⁹

⁸ G.Yulia Novita Sari, dkk, "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no.1 (Januari 2022): 58.

⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 5.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB I Pendahuluan hingga BAB V Penutup, guna mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti menguraikan bab-bab agar memudahkan dalam melakukan pemahaman dan pembahasan.

BAB I Pendahuluan: Berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi tentang ulasan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta pada bab ini memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang penjelasan seputar metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Berisi tentang hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, objek penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan berguna sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajukan dalam suatu penelitian hasil penelitian terdahulu meliputi: Skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dengan menjalankan langkah ini maka dapat diketahui sejauh mana orisinitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Abdul Nasser Hasibuan “*Financial Performance Analysis Using Value For Money Concept*”(2023). Jurnal Ilmu Manajemen (JMAS).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara dalam program pemberdayaan dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program rehabilitasi sosial yang diukur dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan angket. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *value for money* yang terdiri dari tiga unsur yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur reliabilitas data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanganan fakir miskin termasuk dalam kategori ekonomis dan efisien, namun belum tergolong efektif. Kemudian program perlindungan dan jaminan sosial termasuk dalam kategori ekonomis dan efisien, namun belum tergolong efektif. Sedangkan program rehabilitasi sosial termasuk dalam kategori ekonomi, belum tergolong efisien dan belum efektif dalam mencapai sasaran.¹⁰

2. Gerald William Sanger, dkk, 2023, "*Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.*" Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kinerja keuangan dengan metode *Value for Money* pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado, dan (2) untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan dengan metode *value for money* pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado sangat baik dan berpedoman pada tiga prinsip, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, (2) pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah dan

¹⁰ Abdul Nasser Hasibuan, "Financial Performance Analysis Using Value For Money Concept," *Jurnal Ilmu Manajemen (JMAS)* 6, no.1 (Januari, 2023).

untuk pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Hal ini berarti kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* berjalan dengan baik dan selalu berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat.¹¹

3. Versiandika Yudha Pratama, dkk, 2022, "*Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.*" AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada periode tahun 2017-2019 ditinjau menggunakan pendekatan *value for money* dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Melihat karakteristik yang ada, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif deskriptif, dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *value for money* yaitu menilai kinerja dari sisi rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periodenya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 dikategorikan ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Dari sisi efisiensi, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2017 dikatakan cukup efisien, sementara itu pada periode 2018 dan 2019 kinerja belum efisien karena rasionya di atas 100%. Dari sisi efektivitas, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-

¹¹Gerald William Sanger, dkk, "Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no.2 (Januari-Juni, 2023).

2019 cenderung belum maksimal tetapi sudah cukup efektif dengan angka rasio setiap tahunnya yang berada di atas angka rasio sebesar 90%.¹²

4. I Nyoman Utama, dkk, 2022, “*Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money.*” *Jurnal Riset dan Kajian Manajemen.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value For Money* pada Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena atau gejala yang ada di masyarakat dengan menggunakan angka-angka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan pada Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *value for money* yang meliputi rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 berada pada kriteria tidak ekonomis dengan tingkat rasio pencapaian di atas 105%, dan tidak efisien dengan tingkat rasio pencapaian di atas 100%. Sedangkan kriteria efektivitas berada pada kategori efektif dengan rasio antara 90%-100%. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan peninjauan terhadap anggaran yang digunakan dengan melakukan sistem

¹²Versiandika Yudha Pratama, dkk, “Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan,” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no.2 (April, 2022).

pengendalian yang ketat terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran. Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pengguna anggaran harus menggunakan anggaran sehemat mungkin, meminimalisasi pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif seperti pembelian komputer pegawai yang rusak, karena masih bisa diperbaiki, dan menggunakan anggaran seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³

5. Aryo Prasetyo, dkk, 2022, "*Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta.*" *Equilibrium*.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan non profit berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terhadap realisasi anggaran pada Puskesmas Penumping Kota Surakarta. Pengukuran ini menggunakan *value for money*. Sampel Penelitian ini adalah Laporan Keuangan Puskesmas Penumping Tahun 2015-2021. Analisis data yang dilaksanakan yaitu analisis kuantitatif deskriptif yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat indikator kinerja keuangan pada organisasi sektor publik. Metode penelitian ini menggunakan Teknik pengukuran *Value For Money*. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja

¹³I Nyoman Utama, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money," *Jurnal Riset dan Kajian Manajemen* 2, no. 2 (Desember 2022).

BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta masuk dalam kategori ekonomis. Pada tingkat efisiensi, Kinerja BLUD Puskesmas Penumping masuk dalam kategori kurang efisien. Pada tingkat efektivitas, kinerja BLUD Puskesmas Penumping masuk dalam kategori kurang efektif.¹⁴

6. Richardo Rafael Sampow, dkk, 2022, "*Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Bagian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung.*" JAIM: Jurnal Akuntansi Manado.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai kesuksesan pada organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode *value for money* pada BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019, *value for money* merupakan konsep untuk mengukur kinerja berdasarkan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari rasio ekonomi pada tahun 2016 berada pada 89,89% dikatakan cukup ekonomi dan dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 93,41%, dan 94,81%. Rasio efisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 91,67% dan 94,27% ini dikategorikan kurang efisiensi dan dikatakan tidak efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%. Rasio efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada

¹⁴ Aryo Prasetyo, dkk, "Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta," *Equilibrium* 11, no.2 (2022).

tahun 2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan efektif.¹⁵

7. Intan Bella Putri Rumagit, dkk, 2022, “*Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado.*” *Jurnal Riset Akuntansi.*

Value For Money adalah konsep penyelenggaraan lembaga publik yang didasarkan pada tiga hal utama unsur: 1) Ekonomi, sejauh mana instansi pemerintah mengurangi produksi sumber daya sambil menghindari biaya yang tidak perlu. 2) Efisiensi, yaitu hasil penggunaan yang maksimal input seminimal mungkin atau menggunakan input terendah untuk mendapatkan hasil tertentu. 3) Efektivitas, adalah tingkat diperolehnya hasil program dengan tujuan yang telah ditentukan, atau singkatnya perbandingan hasil dan keluaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui apakah kinerja program kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Manado telah memenuhi *Value For Money* dari unsur Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam hal ini merupakan metode deskriptif kualitatif yang mana setiap data yang terkumpul dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan. Hasil yang diperoleh yaitu Dinas Pariwisata Kota Manado program kegiatan pada

¹⁵Richardo Rafael Sampow, dkk, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung,” *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 3, no.2 (Agustus, 2022).

tahun 2020 telah memenuhi persyaratan *Value For Money* dengan menunjukkan hasil yang ekonomis, efisien, dan efektif.¹⁶

8. Isnah Mar'atus Sholikhah dan Novi Khoiriawati, 2022, "*Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money.*" *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Desa Pucangsimo berdasarkan konsep pengukuran kinerja sektor publik *Value For Money*. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengukur dan menganalisis hasil pengukuran pada Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran 2017 sampai 2021 dan data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu: 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo tahun 2017 sampai 2021 berada pada kategori ekonomis. Dari segi efisiensi, pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dari segi

¹⁶ Intan Bella Putri Rumagit, dkk, "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no.1 (2022).

efektivitas, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil cukup efektif.

Simpulan dari penelitian ini yaitu adanya inefisiensi dalam pengendalian belanja sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Desa Pucangsimo untuk menekan kegiatan belanja sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa dengan cara menggali serta mengembangkan potensi desa.¹⁷

9. Ahmad Kudhori dan Indwi Sinar Hardyanti, 2022, “*Financial Performance Analysis Through Value For Money Approach In The National And Political Unit Agency Of Magetan Regency.*” *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan melalui pendekatan *value for money* pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan. Fungsi *value for money* berfungsi sebagai jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*. Ada elemen utama sebagai parameter, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data primer dari laporan kinerja dan laporan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pegawai yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan studi dokumentasi.

¹⁷Isnah Mar'atus Sholikhah dan Novi Khoiriawati, “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money,” *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 4, no.1 (Juli-Desember, 2022).

Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan tahun anggaran 2018–2020 ditinjau dari segi pengukuran ekonomi tergolong baik, dengan hasil pengukuran ekonomi berada di bawah angka kriteria, yang kurang dari 100%. Hasil pengukuran ekonomi tahun anggaran 2018–2020 masing-masing menunjukkan angka 88,90%, 90,16%, dan 89,89%. Dilihat dari hasil pengukuran efisiensi, diperoleh hasil padatahun 2018 sebesar 95,67%, tahun 2019 sebesar 101,09% dan tahun 2020 sebesar 90,12%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2018 dan 2020 dikategorikan efisien, sedangkan pada tahun 2019 dikategorikan kurang efisien. Dilihat dari hasil pengukuran efektivitas, tahun 2018 dan 2019 tidak efektif sebesar 87,61% dan 89,15%, sedangkan tahun 2020 dikategorikan efektif.¹⁸

10. C. Susi Maryanti dan Agus Munandar, 2021, “*Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.*” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi).*

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2019 dengan memakai analisis *value for money*. Penelitian menggunakan data sekunder dari situs website Pemerintah Kota Surabaya dan website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasilnya penelitian ditinjau

¹⁸Ahmad Kudhori dan Indwi Sinar Hardyanti, “Financial Performance Analysis Through Value For Money Approach In The National And Political Unit Agency Of Magetan Regency,” *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology* 3, no. 2 (April 2022).

dari tingkat ekonomi adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kerja 80% sampai dengan 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.¹⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan melalui tabulasi sebagai berikut:

¹⁹C. Susi Maryanti dan Agus Munandar, "Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 5, no.3 (2021).

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Nasser Hasibuan (2023)	Financial Performance Analysis Using Value For Money Concept	1. Membahas Kinerja Keuangan. 2. Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	1. Menggunakan metode kuantitatif. 2. Objek yang diteliti.
2.	Gerald William Sanger, dkk (2023)	Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	1. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	Objek yang diteliti.
3.	Versiandika Yudha Pratama, dkk (2022)	Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan	1. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	Objek yang diteliti.
4.	I Nyoman Utama, dkk (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)	1. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	Objek yang diteliti.
5.	Aryo Prasetyo, dkk (2022)	Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada	Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	1. Menggunakan metode kuantitatif. 2. Objek yang

		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta		diteliti.
6.	Richardo Rafael Sampow, dkk (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Bagian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif. 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i>. 	Objek yang diteliti.
7.	Intan Bella Putri Rumagit, dkk (2022)	Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Dinas Pariwisata Kota Manado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i>. 	Objek yang diteliti.
8.	Isnah Mar'atus Sholikhah dan Novi Khoiriawat (2022)	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Kinerja Keuangan. 2. Membahas Konsep <i>Value For Money</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kuantitatif yang berjenis penelitian Studi Kasus. 2. Objek yang diteliti.
9.	Ahmad Kudhori dan Indwi Sinar Hardyanti (2022)	Financial Performance Analysis Through Value For Money Approach In The National And Political Unit Agency Of Magetan Regency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i>. 	Objek yang diteliti.
10.	C. Susi	Analisis Value	1. Menggunakan	Objek yang

	Maryanti dan Agus Munandar (2021)	For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019	metode kualitatif. 2. Membahas Kinerja Keuangan. 3. Membahas Konsep <i>Value For Money</i> .	diteliti.
--	-----------------------------------	--	--	-----------

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian terdahulu secara keseluruhan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada topik pembahasan yang membahas mengenai konsep *Value For Money*, sedangkan perbedaan secara keseluruhan terletak pada objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel.

Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah daerah untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan semua pihak di luar. Akuntansi sektor publik adalah

teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang nantinya akan diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara tingkat atas dan bawah, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pemerintah, industri publik, organisasi perusahaan, LSM dan sipil organisasi masyarakat, serta melamar proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menysasar mereka yang membutuhkan, untuk membuat keputusan.²⁰

b. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta yang lebih sempit. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak semata-mata disebabkan oleh keragaman dan bentuk organisasi di dalamnya, atau dipengaruhi oleh lingkungan kompleks yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta satuan kerja pemerintah,

²⁰ Putri Ariella Belinda dan Nevi Costari, "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita 1*, no.1 (2021): 61.

perusahaan publik, baik BUMN maupun BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, perguruan tinggi dan organisasi nirlaba lainnya. Bahkan, beberapa tugas dan fungsi sektor publik juga dapat dilakukan oleh sector swasta, misalnya tugas menghasilkan beberapa jenis layanan publik, seperti layanan telekomunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, transportasi umum, dll. Namun untuk beberapa tugas, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintah. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta dalam beberapa hal.²¹

c. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik, memungkinkan manajer untuk mempertanggung jawabkan kinerja, melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, dan secara efektif mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 2.

melaporkan secara terbuka kinerja pemerintah dan penggunaan dana publik.²²

2. Kinerja Keuangan (*Financial Performance*)

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.²³ Sedangkan, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan instansi dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang baik dan benar. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.²⁴

Dalam mencapai tujuan perlu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan kinerja. Penilaian kualitas kinerja dapat dilihat dari penggunaan anggaran dalam laporan keuangan. Kinerja

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

²³ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2017), 25.

²⁴ G.Yulia Novita Sari, dkk, "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no.1 (Januari 2022): 58.

keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran. Penerapan kinerja keuangan yang bernilai transparan dan akuntabilitas diharapkan mampu mengurangi kebocoran dana, pemborosan, dan menemukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan secara ekonomis. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam menentukan imbalan penghargaan atau hukuman dari suatu kinerja.

b. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan terdapat beberapa manfaat pengukuran kinerja keuangan, diantaranya:

- 1) Mengetahui posisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai selama beberapa periode.
- 2) Mengetahui kekuatan dan kelemahan instansi dalam menjalankan kegiatan.
- 3) Digunakan sebagai pembandingan terhadap hasil yang telah dicapai.
- 4) Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran dan tujuan.
- 5) Mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.²⁵

²⁵Fanish Yuliyanda, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara," *PROFJES* 1, no.2 (Desember 2022): 319.

c. Indikator Kinerja Keuangan Sektor Publik

Adapun pengukuran kinerja keuangan di sektor publik ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Ukuran kinerja tersebut diwujudkan dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Adapun 4 aspek diantaranya adalah:

- 1) Aspek pertama, kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Artinya rencana kerja dan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dapat dijalankan.
- 2) Aspek kinerja keuangan publik yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Tujuannya untuk mendorong satker kementerian/lembaga memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.
- 3) Aspek kinerja keuangan publik yang ketiga adalah aspek efektivitas pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa yang berdampak kepada penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang efektif jika proses pengadaan barang/jasa hingga proses pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan secara tepat waktu.
- 4) Aspek kinerja keuangan yang terakhir, dilihat dari aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan.²⁶

²⁶Juanda, "Menilik Indikator Kinerja Keuangan Sektor Publik," Radar Sorong, 2 Agustus 2019, 7.

3. *Value For Money*

a. Pengertian *Value For Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah serta perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan skala moneter. Efisiensi dari pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah dalam mencapai *output* tertentu. Efektivitas merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang in-efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.²⁷

Penerapan konsep *value for money* berarti pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif

²⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 5.

dalam mencari dana maupun menggunakan dana. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan setiap rupiah uang yang diperoleh dan digunakan.²⁸

Value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata *value* dan *money*, konsep *value for money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *time value for money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value for money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.²⁹

Kinerja keuangan merupakan penggambaran keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya, penilaian kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

- 1) Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *input*. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan

²⁸ Halim dan Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 5.

²⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 83.

tidak produktif. Ekonomi, merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (*input*) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai *input*).

- 2) Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisien (berdayaguna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Ada pengertian yang hampir serupa antara efisien dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah.
- 3) Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*). Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan

target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.³⁰

b. Manfaat Implementasi *Value For Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.³¹

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi

³⁰Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney PadaPengadilan Negri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

³¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 8-9.

pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

c. Pengukuran Kinerja Value For Money

Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Untuk mendongkrak kinerja sektor publik, diperlukan manajemen kinerja sektor publik tersebut harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerjanya. *Value for money* merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Rantai *value for money* memiliki 3 elemen utama, yaitu *input-output-outcome*. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.³²

1) Pengukuran Ekonomi

Dalam bahasa organisasi pemerintah, ukuran ekonomi dinyatakan sebagai anggaran yang didistribusikan untuk membiayai kegiatan tertentu. Penghematan terjadi ketika sumber daya melebihi anggaran adalah pemborosan.³³

$$Ekonomis = \frac{\text{input}}{\text{harga input (Rp)}} \times 100\%$$

³²Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 89.

³³Mahmudi, 21.

Keterangan:

Input: Realisasi anggaran pada setiap kegiatan.

Harga *Input*: Anggaran pada setiap kegiatan.

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan program dan aktivitas. *Input* tersebut dapat berupa kas, bahan baku, infrastruktur dan masukan lainnya. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *input* adalah realisasi anggaran, dimana realisasi anggaran merupakan sejumlah dana yang diterima oleh organisasi yang kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan organisasi.³⁴

Nilai *input* merupakan sejumlah dana yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kepentingan organisasinya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nilai *input* adalah target anggaran. Target anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup waktu selama satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.³⁵

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut ekonomis yaitu sebagai berikut:

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti

ekonomis.

³⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 6.

³⁵Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, 145.

- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti **ekonomis berimbang**.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti **tidak ekonomis**.³⁶

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dari tingkat *input* organisasi sektor publik terhadap tingkat *output* sektor publik. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai:³⁷

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output: Persentase hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.

Input: Persentase nilai ekonomis.

Output merupakan hasil yang diperoleh dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Dalam penelitian yang dimaksud dengan *output* adalah persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan. *Input* yang akan dibandingkan dengan *output* untuk menentukan tingkat efisiensi adalah persentase nilai ekonomi, yaitu hasil yang diperoleh atas perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya

³⁶ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, 186.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 22.

(*spending well*). Kinerja organisasi dapat dikatakan efisien apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *inputnya*.³⁸

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat dikatakan efisien yaitu sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti **tidak efisien.**
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti **efisiensi berimbang.**
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti **efisien.**³⁹

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai:⁴⁰

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

³⁸Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 81.

³⁹ Intan Bella Putri Rumagit, dkk, "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no.1 (2022): 4.

⁴⁰Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 22.

Keterangan:

Outcome: Persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output: Persentase hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.

Outcome merupakan persentase dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program yang dilakukan oleh organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan efektivitas apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat dikatakan efektif yaitu sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti **tidak efektif.**
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti **efektivitas berimbang.**
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti **efektif.**⁴²

⁴¹Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 84.

⁴² Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, 187.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam suatu penelitian kualitatif yang bisa diuji adalah datanya di mana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai salah satu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi saat ini, yaitu untuk mengetahui kinerja sektor publik dengan pendekatan *value for money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

⁴³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

⁴⁴Restu Kartiko Widi, *Asas Metode Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima merupakan salah satu organisasi sektor publik yang seharusnya melakukan pengukuran kinerja keuangan berbasis konsep *value for money* yang merupakan pengukuran kinerja pada sektor publik, jadi perlu dilakukan penelitian tentang kinerja keuangan berbasis konsep *value for money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁴⁵ Oleh karena itu peneliti membutuhkan informasi tentang pengukuran kinerja keuangan pada bagian tertentu diantaranya:

Tabel 3. 1 Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	Bapak Fisabilil Haq, S.Pi	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	Sarjana (S1)	BTN Penatoi
2.	Bapak Isra', ST	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing	Sarjana (S1)	Desa Ngali

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Jember Press, 2019), 47.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Alamat
		Produk Kelautan dan Perikanan		
3.	Ibu Nur Ervina Meylani, S.Pi	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	Sarjana (S1)	Suntu
4.	Ibu Rahmah, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarjana (S1)	BTN Tambana

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi diklasifikasikan menjadi 3 jenis: 1) Observasi berpartisipasi, 2) Observasi secara terang-terangan dan tersamar, 3) Observasi tak berstruktur.⁴⁶ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi secara terang-terangan dan tersamar karena dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan dengan terus terang kepada subyek yang penelitian bahwa peneliti sedang melakukan penelitian terkait kinerja keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 106.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.⁴⁷ Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, karena dalam pengumpulan datanya peneliti telah mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti akan menggunakan daftar wawancara yang sudah dibuat dalam mengumpulkan data terkait dengan kinerja keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi yang terkait dalam penelitian ini adalah data Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, struktur organisasi dan dokumen-dokumen lainnya yang menyanggung tentang penelitian ini.

⁴⁷Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dari beberapa referensi atau teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Informasi yang diperoleh yaitu dari buku, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan pengukuran kinerja sektor publik yang berdasarkan pada konsep *value for money*.

E. Analisis Data

Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan sektor publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menggunakan indikator *value for money*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti: *Interview*, observasi, kutipan, dan lain sebagainya yang terlihat lebih banyak kata-kata daripada angka, oleh karena itu data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum akhirnya digunakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa penggalian data dari berbagai sumber data dan jenis data. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa data pencapaian realisasi anggaran, profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, struktur organisasi dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada data yang telah dipilih. Dengan data yang sudah dimiliki, maka peneliti melakukan pemilahan data mana yang akan dipilih dan data mana yang akan dibuang.

3. Penyajian data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dapat memudahkan peneliti untuk melihat apa yang sedang terjadi, dengan artian apakah kesimpulan sudah tepat atau kembali melakukan analisis.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, meninjau ulang catatan lapangan, serta upaya-upaya yang luas agar terbentuk penegasan kesimpulan.⁴⁸

⁴⁸Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 85-94.

F. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka peneliti menggunakan 2 uji keabsahan data untuk menguji penelitian, antara lain:

1) Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁴⁹ Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Dalam teknik triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas jawaban dari subjek. Triangulasi Sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data langsung dari Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan wawancara serta observasi di lapangan yang dilakukan pada subjek penelitian.

2) Uji *Dependability*

Uji *dependability* atau reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, jika peneliti tidak menunjukkan jejak aktivitas lapangannya maka dependabilitasnya patut diragukan.⁵⁰

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 185.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 195.

Jejak aktivitas di lapangan bisa berupa foto pada saat wawancara dan surat izin penelitian yang diberikan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan tahap-tahap penelitian. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian yaitu:

Pertama, Tahap Pra Lapangan. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Langkah pertama yaitu pengajuan judul skripsi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember, kemudian pembagian dosen pembimbing masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai matriks penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diajukan

Kedua, yaitu Tahap Pekerjaan Lapangan. Pada tahap ini peneliti diajukan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Peneliti mendatangi bagian sekretariat dan pihak lainnya untuk memperoleh data-data dan dokumen lainnya.

Ketiga, Tahap Pasca Lapangan. Setelah tahap pengumpulan data selesai maka peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan pengolahan data. Setelah semuanya lengkap maka menuju tahap akhir yaitu menyusun laporan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima merupakan nomenklatur yang diatur penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Bima. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 5 Bidang, dan 16 UPKP.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”⁵¹

2. Lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Kota Bima.

⁵¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima. “Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima,” 23 Oktober 2023.

- a) Batas sebelah utara : Jalan raya
- b) Batas sebelah selatan : Pemukiman
- c) Batas sebelah barat : Pertokoan
- d) Batas sebelah timur : Kodim 108 Kota Bima⁵²

3. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

a) Visi

Mewujudkan kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan berkesinambungan yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah kabupaten Bima.

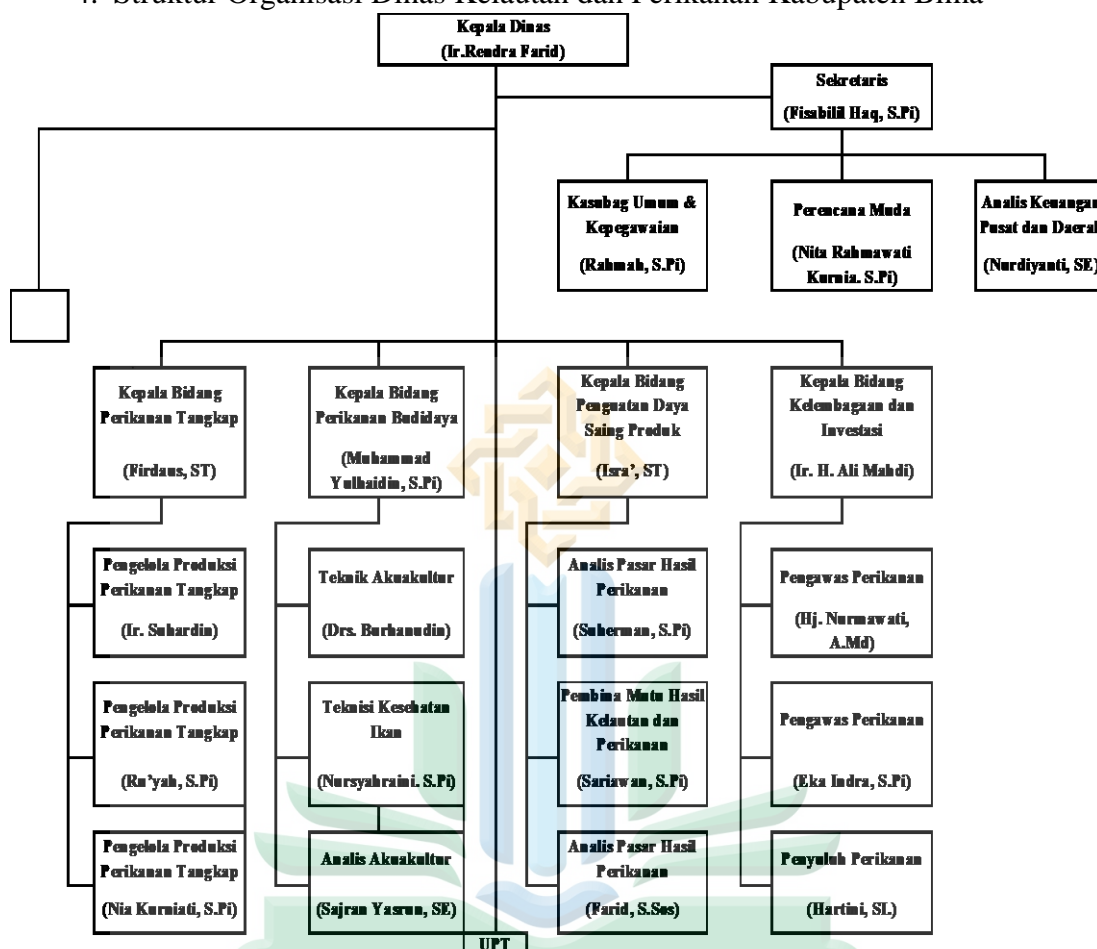
b) Misi

- 1) Meningkatkan penataan/pengembangan sarana prasarana kelautan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Observasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 23 Oktober 2023.

4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima⁵³

Tugas dan Wewenang:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, pengendalian dan pengawasan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan, tugas dekonsentrasi yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan

⁵³ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, "Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima," 23 Oktober 2023.

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
- b. Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang kelautan dan perikanan
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perlengkapan lainnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi
- b. Penyusunan rencana/program kerja dinas
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Pengelolaan administrasi keuangan dinas

- f. Pengelolaan administrasi aset
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan serta anggaran dinas
- i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dana pemeliharaan aset, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja di Subbagian Umum
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian
- d. Melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah
- e. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah
- f. Melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan
- g. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas

- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan kepegawaian
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis Perikanan Budidaya.

Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang Perikanan Budidaya meliputi produksi pembenihan, kesehatan, sarana, prasarana dan bina usaha perikanan
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Perikanan Budidaya meliputi produksi perbenihan, kesehatan, sarana, prasarana, dan bina usaha perikanan
- c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang Perikanan Budidaya
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang Perikanan Tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap meliputi sarana prasarana, pengelolaan sumber daya, pengendalian dan bina usaha
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perikanan tangkap meliputi sarana prasarana, pengelolaan sumber daya, pengendalian dan bina usaha
- c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang perikanan tangkap
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan

6. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang PDSPKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Bidang PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan meliputi bina mutu, diversifikasi produk, akses pasar dan promosi dan usaha dan logistik
 - b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan
7. Bidang Kelembagaan dan Investasi
- Bidang Kelembagaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang Kelembagaan dan Investasi.
- Bidang Kelembagaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang Kelembagaan dan Investasi meliputi SDM, perizinan dan pengelolaan sumber daya
 - b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan dan Investasi meliputi SDM, perizinan dan pengelolaan sumber daya

- c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang Kelembagaan dan Investasi
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.⁵⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Berdasarkan Konsep *Value For Money*

Untuk melihat kinerja keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tahun 2020-2022 dilakukan analisis data dengan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Berikut ini adalah analisis data yang digunakan pada tiap-tiap elemen.

a. Pengukuran Ekonomis

Pada pengukuran ekonomis dapat diukur kegiatan operasionalnya bila mampu mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak diperlukan.

Nilai ekonomis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat dilihat dari nilai rasio, jika nilai rasio semakin kecil maka semakin ekonomis kinerja keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dalam penggunaan anggaran yang ditetapkan.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{harga input (Rp)}} \times 100\%$$

⁵⁴ Pemerintah Kabupaten Bima, Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima.

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran pada setiap kegiatan.

Harga *Input* : Anggaran pada setiap kegiatan.

Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.250.000	722.436.464	96.29%	Ekonomis
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.324.000	47.291.000	99.93%	Ekonomis
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	69.355.000	65.127.500	93.90%	Ekonomis
4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	762.561.000	687.169.310	90.11%	Ekonomis
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.264.970.000	2.213.950.500	97.75%	Ekonomis
6	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk	660.295.000	655.639.500	99.29%	Ekonomis
7	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	2.534.455.000	2.499.447.000	98.62%	Ekonomis
	Rata-rata	7.089.210.000	6.891.061.274	97.20%	Ekonomis

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	908.307.242	876.330.000	96.48%	Ekonomis
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	187.318.000	183.460.000	97.94%	Ekonomis
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	1.986.061.724	1.943.438.500	97.85%	Ekonomis
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.155.380.200	4.087.375.350	98.36%	Ekonomis
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	84.370.000	62.229.500	73.76%	Ekonomis
	Rata-rata	7.184.677.000	6.653.124.779	92.60%	Ekonomis

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1.367.986.000	1.313.219.796	95.99%	Ekonomis
2	Program Pengolahan	593.250.000	590.444.500	99.53%	Ekonomis

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis	Ket
	dan Pemasaran Hasil Perikanan				
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	5.471.125.000	5.406.727.520	98.82%	Ekonomis
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.651.564.000	6.618.191.600	99.50%	Ekonomis
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	60.000.000	58.643.400	97.74%	Ekonomis
	Rata-rata	14.143.925.000	13.987.226.816	99.00%	Ekonomis

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran ekonomi yang dilakukan oleh penulis mengenai kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Di tahun 2020 memiliki 7 program yang telah dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Dapat dideskripsikan bahwa dari total 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, keseluruhan kegiatan dikatakan ekonomis dengan nilai persentase 97.20%.

- 2) Di tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, keseluruhan

program masuk dalam kategori ekonomis dengan nilai persentase 92.60%.

- 3) Di tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, keseluruhan program masuk dalam kategori ekonomis dengan nilai persentase 99%.

Tabel 4. 4 Perbandingan Pengukuran Ekonomis Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Kriteria	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tidak Ekonomis	-	-	-
Ekonomis	-	-	-
Berimbang	-	-	-
Ekonomis	7	5	5
Tidak Dilaksanakan	-	-	-
Rata-rata	97.20%	92.60%	99.00%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan membandingkan antara *output* pada *input* yang dikaitkan dengan target yang telah diterapkan. Nilai efisiensi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat dilihat dari nilai rasio, jika nilai rasio semakin kecil maka semakin efisien kinerja keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dalam memperoleh hasil dari suatu kegiatan.

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.

Input : Persentase nilai ekonomis.

Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

No	Nama Program	Output	Input	Efisiensi	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	96.29%	104%	Efisien
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.00%	99.93%	97%	Tidak Efisien
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	93.90%	106%	Efisien
4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	83.50%	90.11%	93%	Tidak Efisien
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	90.00%	97.75%	92%	Tidak Efisien
6	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk	97.50%	99.29%	98%	Tidak Efisien
7	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	96.50%	98.62%	98%	Tidak Efisien
	Rata-rata	94.93%	96.55%	98%	Tidak Efisien

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Nama Program	Output	Input	Efisiensi	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	96.48%	104%	Efisien
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	98.00%	97.94%	100%	Efisien Berimbang

No	Nama Program	Output	Input	Efisiensi	Ket
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	95.00%	97.85%	97%	Tidak Efisien
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	97.00%	98.36%	99%	Tidak Efisien
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.00%	73.76%	115%	Efisien
Rata-rata		95.00%	92.87%	102%	Efisien

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

No	Nama Program	Output	Input	Efisien	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	95.99%	104%	Efisien
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%	99.53%	100%	Efisien Berimbang
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	99.00%	98.82%	100%	Efisien Berimbang
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	98.00%	99.50%	98%	Tidak Efisien
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100.00%	97.74%	102%	Efisien
Rata-rata		99.40%	98.32%	101%	Efisien

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Di tahun 2020 memiliki 7 program yang telah dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 5 program masuk dalam kategori tidak efisien, dan 2 program masuk dalam kategori efisien.

- b. Di tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 2 program masuk dalam kategori tidak efisien, 1 kegiatan masuk dalam kategori efisien berimbang, dan 2 kegiatan masuk dalam kategori efisien.

- c. Di tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 1 program masuk dalam kategori tidak efisien, kemudian 2 program masuk dalam kategori efisien berimbang, dan 2 kegiatan masuk dalam kategori efisien.

Tabel 4. 8 Perbandingan Pengukuran Efisiensi Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Kriteria	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tidak Efisien	5	2	1
Efisiensi Berimbang	-	1	2
Efisien	2	2	2
Tidak Dilaksanakan	-	-	-
Rata-rata	98%	102%	101%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran memperoleh tingkat pencapaian pada hasil program yang telah di targetkan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai:⁵⁵

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome: Persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output : Persentase hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.

Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Efektivitas Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

No	Nama Program	Outcome	Output	Efektivitas	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100%	Efektivitas Berimbang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.00%	97.00%	98%	Tidak Efektif
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	100.00%	100%	Efektivitas Berimbang
4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	95.00%	83.50%	114%	Efektif

⁵⁵Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 22.

No	Nama Program	Outcome	Output	Efektivitas	Ket
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	95.00%	90.00%	105%	Efektif
6	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk	95.00%	97.50%	97%	Tidak Efektif
7	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	95.00%	96.50%	98%	Tidak Efektif
		95.71%	94.93%	101%	Efektif

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 10 Hasil Pengukuran Efektivitas Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Nama Program	Outcome	Output	Efektivitas	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.00%	100.00%	90%	Tidak Efektif
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%	98.00%	102%	Efektif
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	100.00%	95.00%	105%	Efektif
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100.00%	97.00%	103%	Efektif
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100.00%	85.00%	117%	Efektif
	Rata-rata	98.00%	95.00%	103%	Efektif

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Tabel 4. 11 Hasil Pengukuran Ekonomis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

No	Nama Program	Outcome	Output	Efektivitas	Ket
1	Program Penunjang	100.00%	100.00%	100%	Efektifitas

No	Nama Program	Outcome	Output	Efektivitas	Ket
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Berimbang
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%	100.00%	100%	Efektivitas Berimbang
3	Program Pengelolaan dan Perikanan Tangkap	100.00%	99.00%	101%	Efektif
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100.00%	98.00%	102%	Efektif
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100.00%	100.00%	100%	Efektivitas Berimbang
	Rata-rata	100.00%	99.40%	101%	Efektif

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Di tahun 2020 memiliki 7 program yang telah dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 2 program masuk dalam kategori efektif, kemudian 2 program dalam kategori efektivitas berimbang, dan 3 program masuk dalam kategori tidak efektif.

- b. Di tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 4 program masuk dalam kategori efektif, dan 1 program masuk dalam kategori tidak efektif.

- c. Di tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memiliki 5 program yang telah dilakukan.

Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 2 program masuk dalam kategori efektif, dan 3 program masuk dalam kategori efektivitas berimbang.

Tabel 4. 12 Perbandingan Pengukuran Efektivitas Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Kriteria	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tidak Efektif	3	1	-
Efektivitas Berimbang	2	-	3
Efektif	2	4	2
Tidak Dilaksanakan	-	-	-
Rata-rata	101%	103%	101%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

2. Dampak penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima merupakan organisasi sektor publik yang menangani masalah terkait kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima. Sektor kelautan ini sendiri merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bima, memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima telah menetapkan

program-program tiap tahunnya untuk mendukung perkembangan di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan aktivitas kegiatan atau pelaksanaan programnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima harus memperhatikan kinerjanya. Untuk melihat kinerja dari suatu organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran.⁵⁶

Bapak Fisabilil Haq selaku sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mengatakan bahwa:

“Pengukuran kinerja secara resmi itu tidak ada tetapi kita melakukan pengukuran kinerja itu berdasarkan kemampuan dalam satu tahunan, dari perencanaan keuangannya, realisasi kegiatan dan anggaran, dan laporan keuangan kita apa sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi, yang kita lakukan adalah evaluasi satu tahunan, bila ada yang kurang dalam satu tahunan itu maka akan

⁵⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 8-9.

kita perbaiki dalam tahun berikutnya. Itulah yang biasa kita lakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.”⁵⁷

Penerapan konsep *value for money* tentu memberikan efek bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dalam melihat kinerja yang dimiliki.

1) Ekonomis

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Isra’ selaku kepala bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, mengatakan bahwa:

“Tentu saja dalam perencanaan kegiatan kita melihat kebutuhan masyarakat, tidak lepas dari visi misi nasional, visi misi provinsi, dan visi misi partai terpilih. Semua ini dipadupadankan dengan aspirasi masyarakat entah itu lewat anggota dewan, lewat dinas terkait yang memang turun di lapangan dan aspirasi-aspirasi lain dari teknisi tertentu untuk melahirkan sebuah kegiatan. Untuk penghematannya kita melihat garis-garis tertentu dalam melaksanakan program itu mana titik hematnya, dan jalur-jalur yang harus kita hindari termasuk dalam penentuan harga suatu kegiatan, suatu barang harus mengacu pada harga setempat, harga yang ada di masyarakat bukan harga yang ada di media massa atau iklan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomis sangat penting untuk diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan karena dapat melihat titik hematnya dalam penentuan harga suatu kegiatan.

⁵⁷ Fisabilil Haq, S.Pi, diwawancarai oleh penulis, 01 November 2023.

⁵⁸ Isra’, ST, diwawancarai oleh penulis, Bima, 25 Oktober 2023.

2) Efisiensi

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fisabilil Haq selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, mengatakan bahwa:

“Efisiensi disini kan membicarakan mengenai penggunaan dana yang diberikan kemudian apakah mampu memenuhi target dari kinerja. Kalau kita bangun asumsi semua program yang kita lakukan ini pasti efisien. Jadi selama ini yang kita lakukan tentu melihat dari segi efisien ini”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep efisiensi sangat penting untuk diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, khususnya dalam penggunaan dana anggaran yang diberikan karena untuk melihat kinerja yang ada dapat memenuhi target yang ditetapkan atau tidak.

3) Efektivitas

Hasil wawancara dengan Bapak Isra' selaku kepala bidang PDSPKP, mengatakan bahwa:

“Dalam rencana aksi ini kita memang harus menganut prinsip efektivitas. Kita melaksanakan kegiatan jangan sampai memakan waktu yang lama, membuat masyarakat menunggu. Seperti misalnya musim budidaya garam mulai dari bulan mei atau bulan juni maka kita harus memulai persiapan kegiatan itu pada saat masyarakat membutuhkan, jangan sampai terlewat dari itu maka akan tidak efektif dan sudah tidak memiliki dampak lagi bagi masyarakat yang membutuhkan.”⁶⁰

⁵⁹ Isra', ST, diwawancarai oleh penulis, Bima, 25 Oktober 2023.

⁶⁰ Isra', ST, diwawancarai oleh penulis, Bima, 25 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas sangat penting diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, karena dalam pelaksanaan kegiatannya harus melihat dari kebutuhan masyarakat agar penggunaan dananya tidak sia-sia dan memiliki dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 4. 13 Rekapitulasi Hasil Wawancara Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

No	Subyek Penelitian	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Fisabilil Haq, S.Pi (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima)	Apakah sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima ini sudah menerapkan sistem pengukuran kinerja?	“Pengukuran kinerja secara resmi itu tidak ada tetapi kita melakukan pengukuran kinerja itu berdasarkan kemampuan dalam satu tahunan, dari perencanaan keuangannya, realisasi kegiatan dan anggaran, dan laporan keuangan kita apa sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi, yang kita lakukan adalah evaluasi satu tahunan, bila ada yang kurang dalam satu tahunan itu maka akan kita perbaiki dalam tahun berikutnya. Itulah yang biasa kita lakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan ekonomis?	“Ekonomis ini membicarakan bagaimana penggunaan dana itu secara hemat kan, disini tentu sudah kita terapkan seperti menyesuaikan anggaran yang ada dengan realisasi belanja itu tidak melebihi anggaran dan kita juga sudah berusaha untuk terus melakukan penghematan.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan	“Efisiensi disini kan membicarakan mengenai penggunaan dana yang

No	Subyek Penelitian	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		dikatakan efisien?	diberikan kemudian apakah mampu memenuhi target dari kinerja. Kalau kita bangun asumsi semua program yang kita lakukan ini pasti efisien. Jadi selama ini yang kita lakukan tentu melihat dari segi efisien ini”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan efektif?	“Disini kan kita melihat bagaimana kita melahirkan program dapat bermanfaat bagi orang banyak dan kalau bisa dikatakan tentu kita itu merencanakan kegiatan atau program itu sudah sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat.”
2	Bapak Isra', ST (Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan)	Apakah sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima ini sudah menerapkan sistem pengukuran kinerja?	“Iya mulai dari awal tahun kita sudah menetapkan kinerja dari tiap-tiap personel dari kepala dinas sampai ke staf paling rendah itu sudah di tanda tangan pengukuran kinerjanya begitupun juga dengan target kinerja, rencana aksinya ditetapkan dan tiap bulan ada laporan kinerja serta akhir tahun ada evaluasi kinerja.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan ekonomis?	“Tentu saja dalam perencanaan kegiatan kita melihat kebutuhan masyarakat, tidak lepas dari visi misi nasional, visi misi provinsi, dan visi misi partai terpilih. Semua ini dipadupadankan dengan aspirasi masyarakat entah itu lewat anggota dewan, lewat dinas terkait yang memang turun di lapangan dan aspirasi-aspirasi lain dari teknisi tertentu untuk melahirkan sebuah kegiatan. Untuk penghematannya kita melihat garis-garis tertentu dalam melaksanakan program itu mana titik hematnya, dan jalur-

No	Subyek Penelitian	Pertanyaan	Hasil Wawancara
			jalur yang harus kita hindari termasuk dalam penentuan harga suatu kegiatan, suatu barang harus mengacu pada harga setempat, harga yang ada di masyarakat bukan harga yang ada di media massa atau iklan.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan efisien?	“Jadi efisien disini anggaran yang minim menghasilkan output yang maksimal. Untuk mendapatkan hal ini tentu saja kita melewati beberapa analisa, seperti contohnya analisis swot karena kita harus tahu kelemahan serta kesempatan yang ada, probabilitas yang terjadi, negatif dan positifnya agar hasil yang didapat sesuai dengan keinginan masyarakat.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan efektif?	“Dalam rencana aksi ini kita memang harus menganut prinsip efektivitas. Kita melaksanakan kegiatan jangan sampai memakan waktu yang lama, membuat masyarakat menunggu. Seperti misalnya musim budidaya garam mulai dari bulan mei atau bulan juni maka kita harus memulai persiapan kegiatan itu pada saat masyarakat membutuhkan, jangan sampai terlewat dari itu maka akan tidak efektif dan sudah tidak memiliki dampak lagi bagi masyarakat yang membutuhkan.”
3	Ibu Nur Elvina Meylani, S.Pi (Penyuluh Perikanan Bantu)	Bagaimana kinerja keuangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dari Tahun 2020-2022?	“Untuk kinerja dari tahun 2020 ini sendiri penurunan produksi dikarenakan pandemi yang mulai menyebar di masyarakat jadi semua sektor itu mengalami kendala hingga tahun 2021 akhir dan tahun

No	Subyek Penelitian	Pertanyaan	Hasil Wawancara
			2022 mulai kembali normal.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan ekonomis?	“Kalau dilihat dari ekonomis ini kan penghematan ya, penghematan ini lebih ke cara penggunaannya seperti memanfaatkan sumber daya yang ada di internal, dan pembelian barang itu langsung dari harga pertama atau vendor agar lebih hemat.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan efisien?	“Disini dikatakan sebagai hasil dari anggaran tadi kan. Dalam artian dalam penentuannya menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada tiap desa agar pada kegiatannya tiap desa mendapatkan hasil yang rata.”
		Bagaimana sebuah kinerja keuangan dikatakan efektif?	“Berarti sebuah anggaran ini harus melihat dari segi kebutuhan masyarakat ya agar nanti kegiatan yang dilaksanakan tidak sia-sia.”

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

C. Pembahasan Temuan

1. Kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022 berdasarkan konsep *Value for Money*.

Kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.⁶¹ Kinerja keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran. Kinerja keuangan merupakan penggambaran keberhasilan yang

⁶¹ G. Yulia Novita Sari, dkk, “Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no,1 (Januari 2022): 58.

dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya, penilaian kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan konsep *value for money* berarti pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencari dana maupun menggunakan dana.⁶²

Terdapat kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Bima telah berjalan sesuai dengan elemen *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Kriteria ekonomis adalah sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis, (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang, (3) jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.⁶³ Kriteria efisiensi adalah sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efisien, (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang, (3) jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efisien.⁶⁴ Kriteria efektifitas adalah sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang

⁶² Halim dan Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 5.

⁶³ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, 186.

⁶⁴ Intan Bella Putri Rumagit, dkk, "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no.1 (2022): 4.

dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif. (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang. (3) jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, pada tahun 2023 ada tiga elemen pengukuran kinerja yang telah dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, yaitu:

Tabel 4. 14 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Value For Money Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022

Tahun	Rasio Ekonomi	Kriteria	Rasio Efisiensi	Kriteria	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	97.20%	Ekonomis	98%	Tidak Efisien	101%	Efektif
2021	92.60%	Ekonomis	102%	Efisien	103%	Efektif
2022	99.00%	Ekonomis	101%	Efisien	101%	Efektif

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

a. Ekonomis

Ekonomis diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.⁶⁶ Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi ekonomi rata-rata kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mencapai nilai ekonomis.

⁶⁵ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, 187.

⁶⁶ Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

Pada tahun 2020, terdapat total 53 kegiatan dengan nilai pengukuran ekonomis sebanyak 40 kegiatan dan ekonomis berimbang sebanyak 13 kegiatan. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2020 dikatakan ekonomis sebesar 97.20% karena hampir dari keseluruhan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mampu melakukan penghematan. Pada tahun 2021, terdapat 49 kegiatan dengan nilai pengukuran ekonomis sebanyak 43 kegiatan, ekonomis berimbang sebanyak 5 kegiatan, dan 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2021 dikatakan ekonomis sebesar 92.60%. Rasio ini semakin dibilang ekonomis karena terdapat penghematan dari 1 kegiatan yang terdapat dalam anggaran tetapi tidak terealisasi. Tahun 2022, terdapat 49 kegiatan pula dengan nilai pengukuran ekonomis sebanyak 47 kegiatan, dan ekonomis berimbang sebanyak 2 kegiatan. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2022 dikatakan ekonomis sebesar 99% karena hampir keseluruhan kegiatan dari tiap program dapat dilakukan penghematan.

b. Efisiensi

Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).⁶⁷ Berdasarkan dari analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi efisiensi tahun 2020 dikatakan tidak efisien dan untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 dikatakan efisien. Pada tahun 2020, dari 53 kegiatan yang telah

⁶⁷ Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

dilaksanakan, 19 kegiatan diantaranya dikatakan tidak efisien, 21 kegiatan dikatakan efisien berimbang, dan 13 kegiatan dikatakan efisien. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2020 dikatakan tidak efisien karena rasio dibawah 100% yaitu sebesar 99%. Penyebab program dikatakan tidak efisien karena adanya wabah virus Covid-19 yang dimana dalam menjalankan kegiatannya Dinas Kelautan Perikanan dan Kabupaten Bima tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Pada tahun 2021, dari 49 kegiatan, 13 kegiatan dikatakan tidak efisien, 16 kegiatan dikatakan efisien berimbang, 19 kegiatan dikatakan efisien dan terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2021 dikatakan efisien sebesar 102%. Hal ini menandakan di tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kembali meningkatkan *output* dan meminimalkan *input*. Tahun 2022, terdapat 49 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 13 kegiatan diantaranya dikatakan tidak efisien, 20 kegiatan dikatakan efisien berimbang, dan 16 kegiatan dikatakan efisien. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2022 dikatakan efisien sebesar 103%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten mencapai hasil kerja dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya.

c. Efektivitas

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).⁶⁸ Berdasarkan dari analisis data, dapat diketahui bahwa dari efektivitas rata-rata kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dikatakan efektif. Pada tahun 2020, dari 53 kegiatan, 7 kegiatan dikatakan tidak efektif, 14 kegiatan dikatakan efektivitas berimbang, dan 32 kegiatan dikatakan efektif. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2020 dikatakan efektif sebesar 102%. Hal ini menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, terdapat 49 kegiatan, 29 diantaranya dikatakan efektivitas berimbang, 19 kegiatan dikatakan efektif, dan terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2021 dikatakan efektif sebesar 104%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan rasio efektivitas dari tahun 2020, yang menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten mampu meningkatkan capaian tujuan dan sasaran dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, dari 49 kegiatan, 35 kegiatan dikatakan efektivitas berimbang. Dan 14 kegiatan dikatakan efektif. Sehingga rata-rata akhir pada tahun 2022 dikatakan efektif sebesar 102%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan rasio dari tahun sebelumnya sebesar 0.02% tetapi tetap

⁶⁸ Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

dikatakan efektif yang menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Dampak penerapan konsep *Value for Money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima merupakan organisasi sektor publik yang menangani masalah terkait kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima. Sektor kelautan ini sendiri merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bima, memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima telah menetapkan program-program tiap tahunnya untuk mendukung perkembangan di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan aktivitas kegiatan atau pelaksanaan programnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima harus memperhatikan kinerjanya. Untuk melihat kinerja dari suatu organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan konsep *Value For Money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat

cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, berikut dampak penerapan konsep value for money pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima:

a. Ekonomis

Konsep ekonomis ini mengharuskan organisasi sektor publik melakukan pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*).⁷⁰ Pada penggunaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan konsep ekonomis sangat penting untuk diterapkan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan karena dapat melihat titik hematnya dalam penentuan harga suatu kegiatan. Selain itu juga dengan konsep ekonomis ini dapat membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menurunkan biaya dalam pengadaan dan alokasi sumber daya dan melakukan pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas terbaik.

b. Efisiensi

Konsep efisiensi dapat diartikan sebagai output tertentu yang dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending*

⁶⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 8-9.

⁷⁰ Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

well).⁷¹ Konsep efisiensi sangat penting untuk diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, khususnya dalam penggunaan dana anggaran yang diberikan karena untuk melihat kinerja yang ada dapat memenuhi target yang ditetapkan atau tidak. Dengan penerapan konsep efisiensi ini juga dapat membuat alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan sehingga nantinya membuat anggaran itu tepat pada sasaran.

c. Efektivitas

Konsep efektivitas memiliki artian yaitu kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*). Kegiatan operasional itu dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁷² Konsep efektivitas sangat penting diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, karena dalam pelaksanaan kegiatannya harus melihat dari kebutuhan masyarakat agar penggunaan dananya tidak sia-sia dan memiliki dampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsep efektivitas ini juga bisa membantu meningkatkan efektivitas pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, serta meningkatkan mutu dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

⁷¹ Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," 81.

⁷² Isna Ardila dan Ayu Anindiya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value ForMoney Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* 15, no.1 (Maret, 2015): 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian diatas dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima berdasarkan konsep *value for money* dari sisi ekonomis pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dikatakan ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mampu mengelola anggaran secara tepat dan mampu melakukan penghematan. Selanjutnya, dari sisi efisiensi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima pada tahun 2020 dikatakan tidak efisien dan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dikatakan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tidak bisa dilakukan secara maksimal. Penyebab program dikatakan tidak efisien karena adanya wabah virus Covid-19 yang dimana dalam menjalankan kegiatannya Dinas Kelautan Perikanan dan Kabupaten Bima mengalami keterhambatan dalam beberapa program yang mengakibatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dikatakan tidak efisien. Berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yang dimana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat mencapai hasil kerja dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Terakhir, dari sisi efektivitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dikatakan efektif. Hal tersebut menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Penerapan konsep *value for money* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memberikan dampak pada kinerja keuangan dari sisi ekonomis berupa penggunaan anggaran yang dapat dilihat titik hematnya dalam penentuan harga suatu kegiatan. Dengan penerapan konsep efisiensi ini juga dapat membuat alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan sehingga nantinya membuat anggaran itu tepat pada sasaran. Terakhir, dengan penerapan konsep *value for money* dari sisi efektivitas ini membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tersebut melihat kebutuhan masyarakat agar penggunaan dananya tidak sia-sia dan memiliki dampak bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima agar bisa mempertahankan kinerja keuangan yang ada dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya, baik pada program/kegiatan yang direncanakan maupun dalam penyusunan

anggaran sehingga dapat dievaluasi secara matang dan penggunaan anggarannya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan 3 elemen yaitu ekonomi, efisien, dan efektif, akan tetapi sebaiknya ditambah dengan elemen lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Tsabita Mardhiah. "Analisis Kinerja Melalui Pendekatan Value For Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Periode 2018-2020." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau., 2022.
- Ardila, Isna dan Ayu Anindiya Putri. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negri Tebing Tinggi." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*15, no.1 (Maret, 2015): 78-85.
- Ariella, Putri Belinda dan Nevi Costari. "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no.1 (2021): 58-77.
- Bella, Intan Putri Rumagit, dkk. "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado." *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no.1 (2022): 13-22.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Marwah, 2010.
- Halim dan Kusufi. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Kartiko, Restu Widi. *Asas Metode Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kudhori, Ahmad dan Indwi Sinar Hardyanti. "Financial Performance Analysis Through Value For Money Approach In The National And Political Unit Agency Of Magetan Regency." *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology* 3, no. 2 (April, 2022): 101-114.
- Mar'atus, Isnah Sholikhah dan Novi Khoiriawati. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money." *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 4, no.1 (Juli-Desember, 2022): 38-54.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF, 2006.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

- Nasser, Abdul Hasibuan. "Financial Performance Analysis Using Value For Money Concept," *Jurnal Ilmu Manajemen (JMAS)* 6, no.1 (Januari, 2023): 25-29.
- Nyoman, I Utama, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money." *Jurnal Riset dan Kajian Manajemen* 2, no. 2 (Desember, 2022): 193-200.
- Prasetyo, Aryo, dkk. "Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta." *Equilibrium* 11, no.2 (2022): 21-27.
- Rafael, Richardo Sampow, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung." *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 3, no.2 (Agustus, 2022): 261-271.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81-95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susi, C. Maryanti dan Agus Munandar. "Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 5, no.3 (2021): 2886-2899.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember Press, 2019.
- William, Gerald Sanger, dkk. "Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no.2 (Januari-Juni, 2023): 1193-1202.
- Yudha, Versiandika Pratama, dkk. "Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no.2 (April, 2022): 149-155.
- Yulia, G. Novita Sari, dkk. "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru." *Jurnal Akuntansi Kompetif*, no.1 (Januari 2022): 56-65.
- Yuliyanda, Fanish, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara." *PROFJES* 1, no.2 (Desember 2022): 315-334.

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodelogi Penelitian	Fokus Penelitian
<p><i>FINANCIAL PERFORMANCE</i> BERBASIS KONSEP <i>VALUE FOR MONEY</i> PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2020-2022</p>	<p>1. Kinerja keuangan berbasis konsep <i>value for money</i></p> <p>2. Dampak <i>value for money</i></p>	<p>a) Kinerja keuangan dilihat dari sisi ekonomis</p> <p>b) Kinerja keuangan dilihat dari sisi efisiensi</p> <p>c) Kinerja keuangan dilihat dari sisi efektifitas</p> <p>a) Dampak penerapan dari sisi ekonomis</p> <p>b) Dampak penerapan dari sisi efisiensi</p> <p>c) Dampak penerapan dari sisi efektivitas</p>	<p>1. Informan</p> <p>a. Sekretaris</p> <p>b. Kepala bidang</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>a. Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</p> <p>b. Foto-foto</p>	<p>1. Pendekatan dan Jenis penelitian: Kualitatif, Deskriptif</p> <p>2. Lokasi Penelitian: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>d. Studi Kepustakaan</p> <p>4. Keabsahan Data:</p> <p>a. Uji kredibilitas</p> <p>b. Uji <i>Dependability</i></p>	<p>1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode tahun 2020-2022 berdasarkan konsep <i>Value For Money</i>?</p> <p>2. Bagaimana dampak penerapan konsep <i>Value For Money</i> pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Apriyanisa

NIM : E20193001

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Financial Performance* Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022” adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil dari plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan semoga dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 November 2023

Saya yang menyatakan



Nur Apriyanisa
NIM. E20193001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebelumnya, mengenai pengukuran kinerja keuangan ini, apakah sebelumnya di dinas kelautan dan perikanan kabupaten bima ini sudah menerapkan sistem pengukuran kinerja?
2. Bagaimana kinerja keuangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dari tahun 2020-2022?
3. Dalam pengukuran kinerja terdapat tiga rasio, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Rasio ekonomi adalah kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak pemborosan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hal ini diterapkan dalam anggaran di Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bima ini?
4. Bagaimana sebuah kinerja keuangan ini dikatakan efisien?
5. Bagaimana sebuah kinerja keuangan ini dikatakan efektif?
6. Bagaimana perumusan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima?
7. Bagaimana dampak diterapkan konsep value for money di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-194 /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2023

11 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
Jl. Soekarno Hatta, Sadia, Kota Bima

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nur Apriyanisa
NIM : E20193001
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai *Financial Performance* Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Periode Tahun 2019-2021 di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



4



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln Soekarno – Hatta Telp./FAX. (0374) 43515 Raba-Bima

Surat Keterangan
Nomor : 836/745/06.14/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Ali Mahdi
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Apriyanisa
NIM : E20193001
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Instansi : UIN KH. Achmad Siquiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Financial Performance Berbasis Konsep Value For Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020-2022."






Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Raba - Bima, 17 November 2023

An Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima
Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Ir. H. Ali Mahdi
NIP. 196703121998031011

UNIVERSITAS ISLAM GEMER
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	23 Oktober 2023	Meminta berkas profil dinas, visi misi dan struktur organisasi	
2	25 Oktober 2023	Wawancara dengan Bapak Isra', ST selaku kepala Bidang PDSPKP	
3	31 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Nur Ervina Meylani, S.Pi selaku Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	
4	01 November 2023	Wawancara dengan Bapak Fisabilil Haq, S.Pi selaku sekretaris dinas	
5	08 November 2023	Meminta berkas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020-2022	

Raba - Bima, 17 November 2023

An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima
Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi,



Ir. H. Ali Mahdi
Nip. 196703121998031011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

- a) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima



- b) Ruang Sekretariat



- c) Wawancara dengan Bapak Isra' S.Pi selaku kepala bidang PDSPKP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima



- d) Wawancara dengan Nur Ervina Meylani, S.Pi selaku Penyuluh Perikanan Bantu(PPB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima



- e) Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

3.4. Realisasi Anggaran
3.4.1. Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp.)	Prosentase (%)
BELANJA DAERAH	12,563,613,280	12,269,864,371	97.66%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,474,303,280	5,378,803,097	98.26%
BELANJA LANGSUNG	7,089,210,000	6,891,061,274	97.20%
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	760,250,000	722,436,464	96.29%
Penyediaan Jasa Surat menyurat	6,000,000	7,811,500	97.64%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	72,000,000	51,121,464	71.00%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas dan Perikanan	50,700,000	32,607,800	64.31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor Non Perorangan	222,000,000	222,680,000	100.00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,000,000	15,850,000	99.06%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,000,000	9,000,000	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	14,600,000	13,780,000	94.03%
Penerangan Bangunan Kantor	1,800,000	1,499,000	99.93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10,000,000	7,110,000	71.10%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,859,000	1,849,000	99.46%
Dukungan Operasional UPTD	218,880,000	216,963,000	99.12%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	125,000,000	124,974,000	99.98%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	17,131,000	17,131,000	100.00%
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47,324,000	47,291,000	99.93%
Pembangunan Gedung Kantor	9,379,000	9,358,000	99.78%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17,200,000	17,200,000	100.00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	7,000,000	6,988,000	99.83%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	10,000,000	10,000,000	100.00%
Pemeliharaan Rutin / Pertengkapan Gedung Kantor	1,145,000	1,145,000	100.00%
Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung Kantor	2,000,000	2,000,000	100.00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	600,000	600,000	100.00%
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	69,355,000	65,127,500	93.90%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,500,000	3,860,000	70.18%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	9,500,000	9,470,500	99.69%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,535,000	4,535,000	100.00%
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Aset	4,900,000	4,900,000	100.00%
Pengumpulan dan Pelayanan Data Statistik	44,920,000	42,362,000	94.31%
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	762,561,000	687,169,310	90.11%
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	171,695,000	150,138,000	87.44%
Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	94,795,000	73,895,000	77.95%
Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)	51,830,000	48,222,500	93.04%
Pendamping Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap	15,906,000	12,540,000	78.84%
Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)	26,250,000	23,350,000	88.95%
Pengawasan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan dan Kelautan	68,825,000	67,918,500	98.68%
Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilbanta	51,550,000	40,349,000	78.27%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemeliharaan Biota Laut	50,520,000	49,580,000	98.14%
Penataan dan Pengelolaan Kelestarian Terumbu Karang dan Hutan Mangrove	183,540,000	175,391,310	95.56%
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	47,650,000	45,785,000	96.09%
5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2,264,970,000	2,213,950,500	97.75%
Pengadaan sarana dan Perasarana pemberdayaan usaha skala kecil Masyarakat Pesisir/Nelayan	1,752,560,000	1,719,556,500	98.12%
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan	29,700,000	27,550,000	92.76%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	412,620,000	406,194,000	98.44%
Pembinaan Kelayanan	70,090,000	60,650,000	86.53%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMANGKAPAN PRODUK	660,295,000	655,839,500	99.33%
Peningkatan daya Saing Produk Perikanan (PDS)	35,010,000	34,608,500	98.85%
Pend. Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP)	43,650,000	43,649,500	100.00%
Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	546,200,000	541,946,500	99.22%
Pembinaan Produk Perikanan Pengolahan dan Mutu Produksi Perikanan	35,435,000	35,435,000	100.00%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,534,465,000	2,499,447,000	98.62%
Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	333,980,000	330,100,000	98.84%
Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir/Nelayan	184,566,000	1,621,236,000	88.45%
Pembinaan Usaha kecil masyarakat pesisir/Pertambak Garam	135,780,000	132,422,000	97.53%
Pengadaan Stasion KJA	23,200,000	23,190,000	99.96%
Pengadaan sarana dan prasarana Budidaya ikan Air tawar Skala Kecil	224,960,000	222,928,000	99.08%
Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB	47,650,000	46,750,000	98.11%
Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya Perikanan dan Kelautan	11,490,000	11,490,000	100.00%
Pendampingan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Minapolitan)	65,070,000	63,563,000	97.68%
Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	35,199,000	35,199,000	100.00%
Pelatihan Teknis Teknologi Budidaya Ikan	13,510,000	13,510,000	100.00%

Sumber : Disulitkab. Bima 2021

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12,563,513,280,- (Belanja langsung Rp. 7,089,210,000 dan Belanja tidak langsung Rp. 5,474,303,280) dengan realisasi sebesar Rp. 12,269,864,371 (Belanja Langsung 6,891,061,274 (97,20%) dan Belanja Tidak langsung Rp. 5,378,803,097 (98,26%)). Serapan anggaran Tahun 2020 ini menurun sebesar 0,04 % dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2019) yaitu sebesar (97,24%), %.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2020

f) Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp.)	Prosentase (%)
BELANJA DAERAH	12,154,505,900	11,936,750,279	98.20%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,184,677,000.00	6,653,124,779.00	92.60%
BELANJA LANGSUNG	5,432,601,900	5,283,255,500	97.25%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	908,307,242.00	876,330,000.00	96.48%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,871.500	2,856.000	99.45%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawakan	2,493.000	2,374.000	95.23%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10,131.000	10,100.000	99.69%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2,906.500	2,817.500	96.94%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3,131.500	2,940.000	93.88%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,921.500	2,802.500	95.93%
Penyediaan bahan logistic kantor	1,584.000	1,581.000	99.81%
Penyelenggaraan dan rapat koordinasi dan rapat konsultasi SKPD	321,540,628	321,165.000	99.88%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	10,000.000	5,100.000	51%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1,276.000	1,276.000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,630.000	10,629,750	100.00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11,130,548	10,500.000	94.33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297,776.000	297,680.000	99.97%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021 hal. 35.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,000.000	11,000.000	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000.000	56,930.000	94.88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan lapangan mobil	80,000.000	78,086.000	97.61%
Penyediaan jasa cetak komputer	1,500.000	1,460.000	97.33%
Penyediaan jasa cetak komputer	5,012,630	4,595.000	91.87%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya IT dan jasa internet	59,400.000	47,717.500	79.23%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2,950,628	0.000	0%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,321.000	3,073.500	92.55%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12,000.000	11,456,250	95.47%
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2,709,750	2,650.000	97.79%
2. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	187,318,000.00	183,460,000.00	97.94%
Pelaksanaan Bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	32,765.000	31,124.000	94.99%
Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	33,550.000	32,467.000	96.77%
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	89,988.000	87,863.000	97.64%
Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	64,565.000	64,473.000	99.86%
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TAHINKAP	1,986,061,724.00	1,943,438,500.00	97.85%
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	28,105.000	27,724,250	98.65%
Pengembangan kapasitas nelayan kecil	63,350.000	62,404,576	98.51%
Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal perangkap ikan dan kapal	45,114,400	34,326.000	76.09%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021 hal. 36.

pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT			
Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT	42,430,824	37,418,424	88.19%
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	20,000,000	20,000,000	100 %
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	75,170,000	74,968,750	99.73%
Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	29,055,000	28,391,000	97.71%
Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	1,682,836,000	1,658,205,500	98.54 %
4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4,155,380,200.00	4,087,375,350.00	98.36%
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	117,330,000	115,374,000	98.33%
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	29,108,500	16,822,000	57.79%
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya ikan kecil	36,271,000	32,875,750	90.64%
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	36,159,000	32,595,000	90.14%
Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	42,326,000	38,115,500	90.05%
Perencanaan, Pengembangan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	35,500,000	35,313,500	99.82%
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	61,406,350	60,378,000	98.33%
Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1,717,484,000	1,701,029,250	99.04%
Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	48,575,000	45,552,100	93.78%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021 hal...37...

perencanaan, Pengembangan pemanfaatan dan perlindungan air untuk pembudidayaan ikan di darat	35,500,000	35,434,600	99.82%
Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	27,255,000	27,243,400	99.96%
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	84,370,000.00	62,229,500.00	73.76%
Pengawasan usaha perikanan yang meliputi pemantauan perairan, waduk, rawa dan sungai kabupaten/kota	50,000,000	41,229,500	82.46%
Pengawasan usaha perikanan Budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan perairan air tawar yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	33,820,000	21,000,000	62.09%

Sumber : Laporan Kinerja 2021

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12,154,505,900 (Belanja langsung Rp. 5,432,601,900 dan Belanja tidak langsung Rp. 7,184,677,000.00) dengan realisasi sebesar Rp. 11,936,750,279 (Belanja Langsung 5,283,255,500 (97.20%) dan Belanja Tidak langsung Rp. 6,653,124,779.00 (98.26%) Serapan anggaran Tahun 2021 ini meningkat sebesar 0.48 % dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2021) yaitu sebesar (97,73%).%

3.4.2. Analisis Indikator Kinerja Efisiensi

Secara umum target kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima termasuk kategori baik, namun penyerapan dana/realisasi anggaran yang dilaksanakan tidak dapat terserap 100 %. Hal ini disebabkan karena :

- Sisa dana tender / Penunjukkan langsung tidak terpakai dalam anggaran perubahan (APBDP).
- Adanya efisiensi anggaran, khususnya pada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui negosiasi harga barang/jasa baik dari tender maupun pengadaan langsung.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2021 hal...38

g) Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

3.4.5. Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengukuran pemertaaan dana untuk mencapai sasaran strategi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp.)	Prosentase (%)
BELANJA DAERAH	21.068.829.400,00	20.803.882.662	98,74%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.924.904.400	6.816.655.846	92,69%
BELANJA LANGSUNG	14.143.925.000	13.987.226.816	99,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.367.986.000	1.313.219.796	95,99%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5.000.000	4.999.000	99,99%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.000.000	6.892.000	98%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11.000.000	10.900.000	99%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.000.000	4.485.000	90%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.479.000	90%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	3.417.000	68%
Penyediaan bahan logistic kantor	18.100.000	18.037.000	99,65%
Penyelenggaraan dan rapat koordinasi dan rapat konsultasi SKPD	453.580.000	453.308.000	100%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	11.000.000	6.600.000	60%
Penyediaan komponen instalasi listrik / pemecahan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	10.999.500	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	102.000.000	101.620.000	99,63%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.000.000	34.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas	55.000.000	54.991.500	99,98%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dan atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	62.420.000	59.729.000	95,69%
Pengadaan mobil	83.800.000	83.044.000	99,57%
Penyediaan jasa surat menyurat	17.000.000	16.986.000	99,92%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	75.000.000	44.796.534	59,73%
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.500.000	5.442.000	98,95%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.975.400	99,18%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	22.000.000	21.384.000	97,20%
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5.100.000	5.095.000	99,90%
2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	593.250.000	590.444.500	99,53%
Pelaksanaan Bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	30.000.000	30.000.000	100,00%
Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	30.000.000	28.224.500	94,08%
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	306.250.000	305.678.000	99,81%
Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	227.000.000	226.542.000	99,80%
3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.471.125.000	5.406.727.520	98,82%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	25.000.000	24.995.700	99,98%
Pengembangan kapasitas nelayan kecil	175.000.000	169.250.450	96,71%
Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	30.000.000	28.939.500	96,47%
Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan sampai dengan 10 GT	30.000.000	29.412.100	98,04%
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	120.000.000	119.473.000	99,56%
Penyediaan prasarana usaha penangkapan	5.031.125.000	4.976.225.920	98,91%
Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	30.000.000	29.338.350	97,79%
Penjaminan ketersediaan sarana usaha penangkapan	30.000.000	29.092.500	96,98%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.651.564.000	6.618.191.600	99,50%
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	124.330.000	121.745.500	97,92%
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	25.000.000	23.822.350	95,29%
Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan kecil	30.000.000	28.930.150	96,43%
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Penangkapan Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi dan/atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	36.159.000	32.595.000	90,14%
Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	35.000.000	34.458.950	98,45%
Perencanaan, Pengembangan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	25.000.000	24.416.900	97,67%
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2.594.750.000	2.585.174.250	99,63%
Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah	3.687.484.000	3.673.082.100	99,61%

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022

Kategori	Anggaran	Realisasi	Persentase
Kabupaten/Kota			
Perencanaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	25.000.000	24.995.700	99,98%
Pengembangan kapasitas nelayan kecil	175.000.000	169.250.450	96,71%
Perencanaan, Pengembangan pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	25.000.000	24.416.900	97,67%
Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	30.000.000	29.338.350	97,79%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.000.000,00	58.643.400	97,74 %
Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam kabupaten/kota	30.000.000	29.874.000	99,58%
Pengawasan usaha perikanan Budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam kabupaten/kota	30.000.000	28.769.400	95,90%

Sumber : Dataikan Kab. Bima 2022

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **21.068.829.400,00** . (Belanja langsung Rp 6.324.904.400 dan Belanja tidak langsung Rp 14.143.925.000) dengan realisasi sebesar Rp 20.803.882.662 (Belanja Langsung 6.816.655.846 (98,44%) dan Belanja Tidak langsung Rp 13.987.226.816 (98,89%) . Serapan anggaran Tahun 2022 ini meningkat sebesar 0,54 % dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2021) yaitu sebesar (98,20%) %.

3.4.2. Analisis Indikator Kinerja Efisiensi

Secara umum target kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima termasuk kategori baik, namun penyerapan dana/realisasi anggaran yang dilaksanakan tidak dapat terserap 100 % . Hal ini disebabkan karena :

- Sisa dana tender / Penunjukkan langsung tidak terpakai dalam anggaran perubahan (APBDF).
- Adanya efisiensi anggaran, khususnya pada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui negosiasi harga barang/jasa baik dari tender maupun pengadaan langsung.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-177.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nur Apriyanisa
NIM : E20193001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : FINANCIAL PERFORMANCE BERBASIS KONSEP
VALUE FOR MONEY PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2020-2022

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 November 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Apriyanisa
NIM : E20193001
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 November 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,



Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



IDENTITAS DIRI

Nama : Nur Apriyanisa
NIM : E20193001
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 23 April 2002
Alamat : Bidara Raya IV No.04 RT/RW 025/009
Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota
Kota Bima.
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Telepon/HP : 085338975868
Email : nurapriyanisa1223@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PERWANIDA II SUNTU (2007-2008)
2. SDN 02 SUNTU (2008-2014)
3. MTsN 01 KOTA BIMA (2014-2016)
4. SMAN 04 KOTA BIMA (2016-2019)
5. UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2019-2023)